

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1.Kajian Teori

2.1.1. Partisipasi Publik

Dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki peran penting sebagai pemangku kepentingan karena mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan kebijakan serta peraturan yang berdampak pada kehidupan mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi elemen kunci dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam sistem demokrasi (Roberts 2004; Jacobs et al. 2009; Bryson et al. 2013).

Namun, partisipasi publik dalam tata kelola memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara warga dan pemerintah. Tata kelola mencakup proses pengambilan keputusan dan pengelolaan berbagai kepentingan atau isu kolektif, baik secara formal maupun informal (Kooiman 2003; Bevir 2013). Proses ini berlangsung dalam jaringan yang luas, yang mencakup lembaga-lembaga pemerintah tetapi juga melibatkan berbagai aktor lain, seperti organisasi nirlaba, sektor bisnis, dan entitas lainnya. Tanggung jawab serta dampak pemerintahan yang sebelumnya bersifat tradisional kini semakin tersebar dalam jaringan yang dinamis dan terus berkembang (Goldsmith dan Eggers 2004; Agranoff 2007; Provan dan Kenis 2008).

Seiring dengan berkembangnya konsep tata kelola yang tidak lagi terbatas

pada pemerintah, cakupan dan urgensi partisipasi publik juga semakin meningkat (Osborne 2010; Bryson et al. 2014; Morgan dan Cook 2014). Dalam pembahasan ini, fokus utama diberikan pada keterlibatan publik dalam kegiatan pemerintahan, namun pembaca juga didorong untuk menerapkan konsep dan kritik ini pada berbagai bentuk partisipasi lainnya dalam tata kelola.

Fokus terhadap partisipasi publik telah mengalami perubahan sejak pertama kali menjadi topik utama dalam tata kelola pada tahun 1960-an. Artikel Sherry Arnstein tahun 1969 masih menjadi salah satu karya yang paling banyak dikutip dan berpengaruh di bidang ini. Arnstein menggambarkan sebuah "tangga" yang menunjukkan tingkatan pengaruh dan kewenangan warga dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pendekatan ini mencerminkan semangat gerakan hak-hak sipil dan upaya pemberdayaan komunitas di Amerika Serikat pada masa itu, yang bertujuan mengubah dinamika sosial serta memperjuangkan kekuasaan bagi kelompok yang terpinggirkan (Boyte 1989; Polletta 2012). Dalam beberapa kasus, hal ini dilakukan melalui aksi langsung oleh kelompok yang tertindas (Kahn 1970; Alinsky 1971) untuk menembus struktur pemerintahan dan institusi elitis (Pateman 1970).

Namun, muncul keraguan mengenai efektivitas partisipasi publik dalam mencapai kesetaraan dan inklusi. D.P. Moynihan (1969) mempertanyakan apakah kebijakan pemerintah federal yang mewajibkan "partisipasi semaksimal mungkin" dari kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan justru memperburuk ketimpangan kelas dan ras, daripada mengatasinya. Sementara itu, Arnstein (1969) mengkritik banyak proses yang secara nominal bersifat demokratis, tetapi pada

kenyataannya bersifat simbolis atau manipulatif.

Memasuki awal tahun 2000-an, partisipasi publik telah menjadi praktik umum dan ekspektasi dalam perumusan kebijakan publik (Bingham et al. 2005). Para akademisi dan praktisi kini lebih berfokus pada bagaimana memastikan bahwa partisipasi dilakukan dengan baik, karena ketika diterapkan secara efektif, partisipasi publik dapat memberikan manfaat besar bagi pengambilan keputusan, kewarganegaraan, dan inklusi sosial (Bryson et al. 2013). Praktik ini juga semakin profesional, dengan berkembangnya komunitas fasilitator partisipasi publik (Moore, A. 2012), serta pelatihan manajer publik dan organisasi nirlaba dalam keterampilan fasilitasi partisipasi publik (Leighninger 2010).

Namun, metode partisipasi yang digunakan sangat bervariasi, sehingga muncul minat yang besar dalam desain dan implementasi yang efektif (Sandfort dan Quick 2013). Dalam pembahasan ini, kami tidak hanya menyoroti topik-topik partisipasi publik kontemporer, tetapi juga mencatat bahwa masalah kesetaraan dan eksklusif masih belum sepenuhnya teratasi.

Implementasi partisipasi dalam tata kelola memiliki dampak signifikan dalam membentuk konsep "publik". Berbagai proses partisipasi menghasilkan komunitas demokratis yang berbeda (Quick dan Feldman 2011; Dewey [1927] 2012). Misalnya, memberikan kesaksian dalam sebuah dengar pendapat publik menciptakan rasa keterlibatan dan kepemilikan terhadap suatu permasalahan dan solusinya yang berbeda dibandingkan dengan keterlibatan dalam proses deliberatif jangka panjang (Innes dan Booher 2010).

Terkadang, proses partisipasi ditujukan kepada masyarakat umum, terkadang kepada kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan khusus, dan di lain waktu hanya melibatkan perwakilan dari kelompok pemangku kepentingan utama. Variasi dalam mendefinisikan "publik" dan mekanisme representasi ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hal keberagaman dan akses terhadap pengambilan keputusan. Bergantung pada strategi sosialisasi, perekrutan peserta, serta dinamika lingkungan dalam konsultasi, proses yang dirancang untuk melibatkan kelompok kecil pemangku kepentingan utama berpotensi memperparah kesenjangan kekuasaan dan elitisme (Cooke dan Kothari 2001; Dasgupta dan Beard 2007).

Partisipasi juga memengaruhi bagaimana individu memahami hak dan keterlibatan mereka sebagai anggota masyarakat (Soss 2005). Melalui partisipasi, individu dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan kewarganegaraan demokratis (Pateman 1970; Mansbridge 1999), menghasilkan manfaat publik yang berkelanjutan (Nabatchi 2010; Boyte 2011), serta membantu mendefinisikan kepentingan publik (Reich 1990). Partisipasi juga menjadi dasar bagi pembelajaran sosial yang lebih luas (Ansell 2011).

M. Moore (2014) berpendapat bahwa dalam sistem demokrasi, publik yang didefinisikan secara kolektif melalui proses demokratis—yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan partisipasi—adalah pihak yang paling tepat dalam menentukan nilai publik, terutama ketika menyangkut aset yang dimiliki oleh pemerintah.

2.1.2. Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam kebijakan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi strategi pengelolaan sampah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta memperkuat kesadaran akan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Beberapa teori dan model partisipasi telah dikembangkan untuk memahami peran masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pengelolaan limbah.

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi publik mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, pemanfaatan, dan evaluasi kebijakan atau program pembangunan. Model ini menegaskan bahwa partisipasi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi harus memberikan pengaruh nyata terhadap proses pengambilan keputusan. Arnstein (1969) mengembangkan Ladder of Citizen Participation yang mengelompokkan partisipasi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkat manipulasi (pseudo-participation) hingga kontrol masyarakat penuh terhadap kebijakan. Model ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pengaruh masyarakat dalam menentukan keputusan yang berdampak pada mereka.

Oakley dan Marsden (1984) menekankan bahwa partisipasi publik harus bersifat sukarela dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Pretty (1995) membagi partisipasi ke dalam beberapa tingkat, mulai dari partisipasi pasif (sekadar menerima informasi) hingga partisipasi swadaya di mana masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan implementasi

kebijakan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi publik sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. UNDP (1993) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kebijakan lingkungan dapat meningkatkan efektivitas program serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan. Misalnya, studi oleh Sembiring dan Nitivattananon (2010) mengungkapkan bahwa kurangnya edukasi dan insentif menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program daur ulang dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sebaliknya, penelitian oleh Lestari dan Trihadiningrum (2019) menunjukkan bahwa program bank sampah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah, terutama ketika didukung oleh regulasi yang jelas dan insentif ekonomi.

Di tingkat internasional, penelitian oleh Wilson et al. (2012) menyoroti keberhasilan pendekatan community-based waste management di berbagai negara berkembang, seperti India dan Brasil. Model ini menekankan pentingnya edukasi, insentif ekonomi, dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dibandingkan dengan penelitian di negara maju, partisipasi publik dalam pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan sosial. Studi oleh Sharp et al. (2010) di Inggris menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas sangat bergantung pada kesadaran lingkungan yang tinggi dan dukungan regulasi yang kuat. Sementara itu, di

Indonesia, meskipun terdapat berbagai inisiatif seperti bank sampah dan program daur ulang, keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah akibat minimnya edukasi dan dukungan kebijakan yang efektif.

Pengelolaan yang efektif memerlukan dukungan dari semua pihak melalui tindakan nyata. Salah satu contohnya adalah pendirian bank sampah di tingkat desa, yang dikelola secara mandiri oleh komunitas lokal dengan memberdayakan kreativitas ibu-ibu PKK. Kegiatan ini mencakup pemilahan sampah di rumah dan pengelolaan lebih lanjut di bank sampah untuk didaur ulang. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, inisiatif ini juga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi ibu-ibu PKK. Untuk meningkatkan produktivitas PKK desa sebagai garda terdepan dalam pengelolaan rumah tangga, penting untuk melakukan pengkaderan yang baik serta memberikan pelatihan tentang pengelolaan sampah dan inovasi dalam menciptakan nilai ekonomi dari sampah.

2.1.3. Manajemen Pengelolaan Sampah Perkotaan

Di antara tiga krisis lingkungan utama—perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati [United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2022]—polusi menjadi perhatian yang semakin meningkat karena sifatnya yang kompleks dan multidimensional. Berbagai tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia telah merusak alam, termasuk ekosistem laut (Halpern et al., 2019), salah satunya melalui limbah padat. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti pertumbuhan populasi dan ekonomi, urbanisasi yang pesat, serta perubahan pola konsumsi yang mempercepat peningkatan produksi sampah perkotaan (Municipal Solid Waste/MSW) (Minghua et al., 2009). Akibatnya,

pembuangan dan akumulasi limbah di lingkungan semakin meningkat, memunculkan dampak dengan berbagai tingkat keparahan serta tantangan kompleks dalam tata kelola masalah ini (Sujauddin et al., 2008), yang kini menjadi topik perdebatan global.

Tingkat dan pola produksi sampah sangat bergantung pada budaya, kondisi sosial ekonomi, kepadatan penduduk, serta aktivitas komersial dan industri di suatu kota atau wilayah (Abubakar et al., 2022). Di kota-kota di Global South—yang didefinisikan oleh Santos (2007) sebagai negara-negara dalam sistem dunia modern yang berada di wilayah periferal dan semi-periferal, serta oleh Brandt (1980) sebagai negara berkembang atau dalam transisi yang terletak di selatan negara-negara industri maju (kecuali Australia dan Selandia Baru)—masalah pengelolaan sampah seringkali diperparah oleh sistem pengelolaan limbah yang lemah atau tidak memadai di semua tahap, mulai dari pengumpulan, penanganan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Kondisi ini menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Abubakar et al., 2022). Pengelolaan MSW yang buruk dan tidak efektif sering kali berujung pada pembuangan sampah secara sembarangan di jalanan, ruang publik terbuka, serta badan air, seperti yang terlihat di berbagai negara, termasuk Brasil, Pakistan, India, Nepal, Peru, Guatemala, Kenya, Rwanda, Afrika Selatan, Nigeria, dan Zimbabwe (Abubakar et al., 2022), yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencemaran sungai dan laut (Alencar et al., 2023).

Sementara negara-negara berpenghasilan tinggi lebih fokus pada upaya mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, negara-negara di Global South masih

bergulat dengan tantangan kelembagaan, teknologi, dan sosial ekonomi yang menghambat sistem pengumpulan dan pembuangan sampah yang layak. Selain itu, mereka juga menghadapi inefisiensi operasional dalam seluruh proses pengelolaan MSW (Guerrero et al., 2013). Semua aspek ini pada akhirnya terkait dengan kualitas tata kelola MSW dalam berbagai konteks ekonomi, sosial, dan politik di tingkat nasional maupun subnasional (Szirmai, 2012).

Rose-Ackerman (2017) menyoroti berbagai interpretasi konsep tata kelola (*governance*) yang bergantung pada konteks penggunaannya, sehingga menciptakan tantangan dalam penerapannya. Marques (2013) mendefinisikan tata kelola sebagai “kumpulan aktor negara dan non-negara yang saling terhubung melalui hubungan formal dan informal dalam proses pembuatan kebijakan serta beroperasi dalam kerangka institusional tertentu” (Marques, 2013, hlm. 16–17). Dalam kajian ini, kami mengacu pada definisi tata kelola dari Kaufmann dan Kraay (2021), yang memandangnya sebagai proses pelaksanaan lembaga dan tradisi melalui kewenangan suatu negara atau daerah, termasuk dalam pemilihan dan pengawasan pemerintahan, kapasitasnya dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan publik, serta hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan ekonomi.

Tata kelola merupakan susunan kelembagaan yang kompleks, yang dapat diekspresikan melalui norma-norma interaksi yang halus, serta secara tidak langsung melalui pengaruh terhadap agenda, di mana aktor-aktor mengakses sumber daya serta mengadopsi atau menentang keputusan (Lebel et al., 2006). Dengan demikian, konsep tata kelola menekankan keterlibatan berbagai aktor

formal dan informal dalam proses interaksi yang dinamis antara organisasi publik dan swasta. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih kompleks terhadap sistem sosial-teknis yang bersifat non-linear (Shove dan Walker, 2010), seperti teknologi, kebijakan, pengguna, infrastruktur, dan diskursus budaya yang terbentuk secara historis. Elemen-elemen sistem ini terus direproduksi, dipertahankan, dan ditingkatkan secara bertahap oleh berbagai aktor, termasuk perusahaan, pengguna sumber daya, pembuat kebijakan, regulator, serta kelompok kepentingan tertentu.

Dalam menilai dan memantau berbagai elemen tata kelola, pengembangan serta penerapan indeks telah menjadi kebutuhan yang terus berkembang. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan pesat sumber indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, kualitas institusi, dan persepsi masyarakat (Yong dan Wenhao, 2012). Penggunaan metode yang mampu mengumpulkan informasi mengenai kinerja tata kelola, seperti indeks, semakin dibutuhkan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik secara berkelanjutan (Vergara dan Tchobanoglous, 2012; Pereira dan Fernandino, 2019).

Indeks-indeks ini, yang juga dikenal sebagai indikator sintetis, membantu mengidentifikasi kelemahan tata kelola suatu kota, sehingga memungkinkan perbaikan melalui reformasi yang tepat (Yong dan Wenhao, 2012). Namun, pembuatan dan penerapan indeks untuk menilai serta memantau tata kelola bukanlah proses yang netral; hal ini dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan serta faktor sosial dan politik (Buta dan Teixeira, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan metode yang mampu menerjemahkan berbagai dimensi realitas guna menilai tata kelola dalam isu-isu mendesak, termasuk pengelolaan sampah

perkotaan (MSW).

2.1.4. Partisipasi Berbasis Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting dalam mempromosikan keterlibatan masyarakat dan mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Partisipasi mereka dalam tata kelola, pengembangan masyarakat, dan advokasi secara substansial memengaruhi perumusan kebijakan dan kesejahteraan publik. Studi literatur ini mengkaji konsep partisipasi yang dimungkinkan oleh LSM, strategi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat, hambatan yang dihadapi, dan pengaruh sosial mereka. Partisipasi merupakan elemen penting dari tata kelola demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. “Tangga Partisipasi Warga Negara” karya Arnstein (1969) menawarkan kerangka kerja mendasar untuk memahami tingkat partisipasi, mulai dari non-partisipasi hingga kontrol warga negara. Teori pembangunan partisipatif (Chambers, 1997) menggarisbawahi perlunya metodologi bottom-up di mana masyarakat lokal berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Lembaga swadaya masyarakat sering kali berperan sebagai mediator, mempromosikan keterlibatan inklusif melalui pendidikan, advokasi, dan peningkatan kapasitas.

Lembaga swadaya masyarakat menggunakan banyak strategi untuk meningkatkan keterlibatan publik. Kampanye advokasi dan kesadaran menginformasikan masyarakat tentang hak-hak mereka dan masalah kebijakan melalui media, lokakarya, dan mobilisasi akar rumput (Keck & Sikkink, 1998). Program pengembangan kapasitas dan pelatihan meningkatkan pemberdayaan

individu melalui pengembangan keterampilan dan pelatihan kepemimpinan, memfasilitasi partisipasi dalam kegiatan pemerintah dan ekonomi (Fowler, 2000). Banyak LSM menggunakan strategi pengambilan keputusan partisipatif, melibatkan anggota masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proyek pembangunan (Cornwall, 2008). Selain itu, LSM membentuk forum untuk kesukarelaan dan keterlibatan akar rumput, mendorong gerakan sosial dan aksi kolektif (Smith et al., 2016).

Meskipun fungsinya penting, LSM menghadapi banyak kendala dalam mempromosikan partisipasi yang efektif. Keterbatasan keuangan dan sumber daya sering kali menghambat kapasitas mereka untuk mempertahankan program partisipasi (Edwards & Hulme, 1996). Kendala pemerintah dan hambatan politik, terutama di bidang dengan undang-undang yang melarang, membatasi kegiatan LSM dan partisipasi publik (Carothers & Brechenmacher, 2014). Masalah representasi dan validitas muncul, karena beberapa LSM merasa sulit untuk secara autentik mewakili populasi yang terpinggirkan, yang mengakibatkan pertanyaan tentang legitimasi mereka (Banks et al., 2015). Selain itu, mempertahankan komitmen jangka panjang di luar siklus proyek terus menjadi kesulitan yang signifikan (Mohan & Stokke, 2000).

Penelitian menunjukkan bahwa LSM memainkan peran penting dalam tata kelola partisipatif dan pembangunan sosial. Mereka mempromosikan keterlibatan warga dengan mendorong wacana publik dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan (Putnam, 1993). Organisasi nonpemerintah (LSM) memengaruhi kebijakan dan mempromosikan perubahan sosial dengan mendorong reformasi dan

keadilan sosial (Bebbington et al., 2008). Selain itu, LSM sangat penting dalam memperkuat populasi yang terpinggirkan, termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat adat, melalui upaya partisipasi yang terfokus (Kabeer, 2005). Selain itu, mereka meningkatkan inisiatif pemerintah dalam memberikan layanan penting, terutama di negara-negara miskin (Lewis & Kanji, 2009).

2. 2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Latanna, M. D., Gunawan, B., Franco-García, M. L., & Bressers, H. (2023) -Scopus	Governance Assessment of Community- Based Waste Reduction Program in Makassar	Kualitatif	- Tata kelola program pengurangan sampah di Makassar sebagian besar bersifat restriktif, yang berarti terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. - Pemerintah daerah dan masyarakat merupakan aktor terpenting dalam pengelolaan sampah. - Studi ini menemukan cara untuk meningkatkan tata kelola dan efektivitas sistem pengelolaan sampah..
2	Oates, L., Kasaija, P., Sseviiri, H.,	Pluralizing the urban	Kualitatif	- Pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjalankan fungsi

	Sudmant, A., Ersoy, A., & Van Bueren, E. (2023) - Scopus	waste economy: insights from community-based enterprises in Ahmedabad (India) and Kampala (Uganda)		tambahan dalam pengelolaan sampah kota. - Perusahaan ini memprioritaskan keberlanjutan dan kesejahteraan manusia daripada memaksimalkan keuntungan. - Keberhasilan dan pengaruh mereka bergantung pada dukungan pemerintah, yang dapat memfasilitasi kontribusi sukses mereka terhadap pengelolaan sampah dan tujuan pembangunan menyeluruh.
3	Yandri, P., Budi, S., & Putri, I. A. P. (2023) -Scopus	Waste sadaqah: a new community-based waste management practice in Java, Indonesia	Kualitatif	- Sedekah Sampah (WS) adalah gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang unik yang memadukan aksi sosial dengan pemberdayaan ekonomi. - WS berkontribusi pada penanganan sampah, perbaikan lingkungan, dan praktik ekonomi sirkular (CE). - Penelitian ini mengidentifikasi WS sebagai sesuatu yang

				berbeda dari model pengelolaan sampah berbasis masyarakat lainnya, dengan menekankan dampak sosial dan ekonominya.
4	Zahrah, Y., Yu, J., & Liu, X. (2024) -Scopus	How Indonesia's Cities Are Grappling with Plastic Waste: An Integrated Approach towards Sustainable Plastic Waste Management	Kualitatif	- Departemen Lingkungan Hidup sebagai badan pemerintah utama, bank sampah berbasis masyarakat yang memainkan peran penting dalam memulihkan plastik yang dapat didaur ulang, dan perusahaan pengelolaan sampah swasta yang berkontribusi pada upaya pengumpulan. - Meskipun ada inisiatif ini, komposisi sampah plastik bervariasi di setiap kota, dengan Bandung yang sebagian besar menghasilkan plastik lunak, Yogyakarta plastik tebal, dan Magelang plastik keras. - Beberapa tantangan menghambat PWM yang efektif, termasuk inkonsistensi politik,

				hukum, dan kelembagaan, risiko lingkungan karena tingginya sampah yang tidak dikumpulkan, keterbatasan keuangan dan teknis, dan hambatan sosial budaya seperti rendahnya kesadaran dan partisipasi publik. - Sementara tren positif menunjukkan kemajuan menuju sistem terpadu, integrasi penuh tetap menjadi tantangan.
5	Amato-Lourenco, L. F., Franca, G. C., Seckler, M. M., & Mauad, T. (2024) -Scopus	Enhancing urban waste sustainability through community-driven composting in São Paulo megacity	Kualitatif	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Surabaya melibatkan sektor swasta dari beberapa perusahaan dan peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah di sekitar tempat tinggal mereka melalui bank sampah - Penelitian menemukan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya, PT. Sumber Organik, dan masyarakat dapat bekerja dengan baik dalam menangani tumpukan sampah di

				Surabaya. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak adalah kunci dalam mengatasi masalah lingkungan di kota-kota metropolitan. - Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bank sampah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi dan mendaur ulang sampah.
6	Samitthiwetcharong, S., Kullavanijaya, P., Suwanteep, K., & Chavalparit, O. (2023)	Towards sustainability through the circular economy of plastic packaging waste management in Rayong Province, Thailand	Mixed Methods	- Studi ini menunjukkan bahwa tiga jaringan aktor—kebijakan, ekonomi, dan masyarakat—memperlihatkan fungsi yang unik namun saling terkait dalam daur ulang PPW. Jaringan kebijakan, yang terdiri dari otoritas dan komite nasional, bertugas menetapkan undang-undang dan target untuk pelaksanaan lokal. J - Jaringan ekonomi terdiri dari pengumpul sampah formal dan informal, yang

				berkontribusi antara 11,3persen dan 64,1persen terhadap keseluruhan proses daur ulang PPW. - Jaringan masyarakat memperkuat sistem dengan menyediakan informasi, teknologi, dan dukungan finansial untuk meningkatkan kolaborasi. - Studi ini membedakan antara dua model daur ulang sampah: manajemen berbasis masyarakat, yang dicirikan oleh upaya lokal dalam skala yang lebih kecil, dan manajemen berbasis kotamadya, yang mencakup area yang lebih luas dengan sumber daya dan efisiensi yang ditingkatkan. Masalah utama meliputi jaminan kelayakan finansial pemilahan sampah informal, peningkatan kesadaran publik dan pemilahan sampah rumah tangga, dan penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang kuat. - Penelitian ini menyoroti bahwa
--	--	--	--	--

				penggabungan insentif finansial, pendidikan lingkungan, dan penegakan hukum yang kuat sangat penting untuk mewujudkan ekonomi sirkular yang berkelanjutan untuk daur ulang PPW.
7	Salsabila, L., Lodan, K. T., & Khairina, E. (2023)	Public Engagement Impact on Sustainable Waste Management in Indonesia: Examining Public Behavior	Kualitatif	- Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah meskipun pemerintah telah memprioritaskannya. - Penumpukan sampah yang berlebihan merupakan masalah utama, dengan banyaknya sampah yang tidak tertangani. - Berlawanan dengan penelitian sebelumnya, studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memainkan peran yang lebih kecil dalam memecahkan tantangan pengelolaan sampah di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti kompleksitas pengelolaan sampah berbasis komunitas dan tantangan yang dihadapinya di berbagai negara. Studi Latanna et al. (2023) mengungkap bahwa tata kelola program pengurangan

sampah di Makassar bersifat restriktif, dengan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem ini. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan perlunya perbaikan dalam koordinasi dan regulasi agar program lebih efektif. Sejalan dengan itu, Oates et al. (2023) menemukan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas di Ahmedabad dan Kampala memiliki peran tambahan dalam sistem pengelolaan kota dengan mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah, yang dapat memperkuat kontribusi mereka dalam pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan.

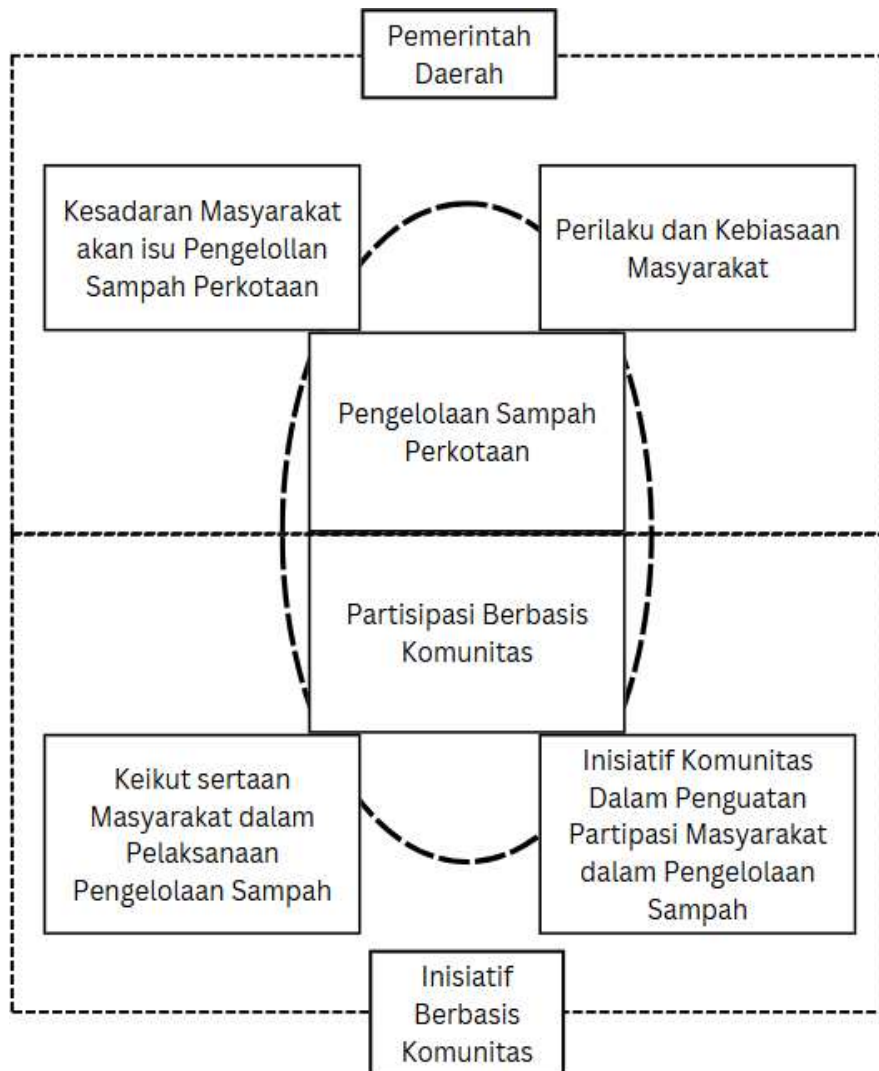
Sementara itu, Yandri et al. (2023) memperkenalkan konsep Waste Sadaqah (WS) sebagai praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas yang unik di Jawa, Indonesia. WS mengombinasikan aspek sosial dan ekonomi dalam pengelolaan sampah, serta berkontribusi pada ekonomi sirkular dan perbaikan lingkungan. Berbeda dengan model pengelolaan lainnya, WS menekankan manfaat sosial-ekonomi sebagai elemen kunci keberhasilannya. Zahrah et al. (2024) menyoroti pendekatan terpadu dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia, dengan peran utama dimainkan oleh Departemen Lingkungan Hidup, bank sampah komunitas, dan perusahaan swasta. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa tantangan seperti inkonsistensi kebijakan, risiko lingkungan, keterbatasan keuangan, dan hambatan sosial budaya masih menjadi kendala utama dalam mencapai pengelolaan sampah plastik yang efektif.

Lebih lanjut, penelitian Amato-Lourenco et al. (2024) menyoroti bagaimana kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat dalam sistem bank sampah di

Surabaya mampu mengatasi tumpukan sampah dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya daur ulang. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan dalam menangani masalah lingkungan di kota metropolitan. Studi Samitthiwetcharong et al. (2023) di Thailand menyoroti peran tiga jaringan utama dalam daur ulang plastik kemasan, yaitu kebijakan, ekonomi, dan masyarakat. Studi ini membedakan antara model pengelolaan berbasis komunitas yang berskala kecil dan model berbasis kotamadya yang lebih luas dan efisien. Hasilnya menunjukkan bahwa insentif finansial, pendidikan lingkungan, dan kebijakan yang ketat sangat penting dalam menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Namun, penelitian Salsabila et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah telah diprioritaskan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat masih rendah dan tidak memainkan peran dominan dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan beberapa studi sebelumnya yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini secara kolektif menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas sangat bergantung pada dukungan pemerintah, regulasi yang kuat, insentif finansial, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Adaptasi dari Alazada, A. M., & Magnaye, D. C. (2022) dalam Buku Berjudul *“Greening the Local Solid Waste Management Through Community Participation: Unfolding the Challenges and Creating Opportunities for Development Planning”*

Bagan ini menggambarkan model konseptual pengelolaan sampah perkotaan berbasis partisipasi komunitas yang melibatkan berbagai elemen penting. Pemerintah daerah berperan sebagai pemangku kebijakan utama yang mengatur regulasi, memberikan fasilitas, serta mendukung inisiatif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah perkotaan. Kesadaran masyarakat terhadap isu pengelolaan sampah perkotaan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku dan kebiasaan mereka dalam mengelola sampah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin baik pula pola perilaku mereka dalam memilah, mengolah, dan membuang sampah dengan benar.

Pada bagian inti, pengelolaan sampah perkotaan menjadi pusat dari sistem yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran dan perilaku masyarakat, intervensi pemerintah, serta inisiatif komunitas. Salah satu pendekatan utama dalam model ini adalah partisipasi berbasis komunitas, yang mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui berbagai aksi kolektif dan program sosial. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, yang mencakup kegiatan seperti daur ulang, pengelolaan bank sampah, serta pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Selain itu, komunitas juga berperan dalam memperkuat keterlibatan masyarakat melalui berbagai inisiatif komunitas dalam penguatan partisipasi masyarakat, seperti edukasi lingkungan, kampanye kebersihan, dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Sebagai elemen pendukung utama, inisiatif berbasis komunitas menjadi motor penggerak dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih

berkelanjutan. Inisiatif ini mencerminkan berbagai program dan aksi yang muncul dari kesadaran kolektif masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah secara mandiri. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, kesadaran dan perilaku masyarakat, partisipasi komunitas, serta inisiatif lokal, pengelolaan sampah perkotaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.



